

Legitimasi SBY dan Harapan Pemilih

Mohammad Fajrul Falaakh

Reformasi konstitusi telah menempatkan pemilih Indonesia pada kedudukan yang lebih berdaulat dalam menentukan pemimpinnya. Sudah dua kali bangsa Indonesia memilih langsung pasangan presiden dan wakil presiden.

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 dilaksanakan dua babak karena tidak ada pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) yang berhasil ditetapkan sebagai presidenwapres terpilih pada babak pertama. Selain baru pertama kali pemilih menggunakan haknya dalam pilpres langsung, pasangan caprescawapres pada Pilpres 2004 berjumlah lima.

Kondisi ini mengakibatkan suara pemilih tersebar sehingga pasangan capres-cawapres peringkat pertama hanya didukung suara pemilih sebanyak 33,57% dan pasangan peringkat kedua didukung 26,60%. Konstitusi mengharuskan pilpres babak kedua yang kemudian dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan M Jusuf Kalla (JK). Pilpres 2009 berbeda.

Caprescawapres yang berkompetisi hanya tiga pasang. Menurut hitungan matematis dengan distribusi normal, masing-masing pasangan akan memperoleh dukungan suara sekitar 30%. Namun, berbagai hasil hitung cepat menunjukkan pasangan SBY-Boediono langsung memperoleh dukungan 60-an persen suara sah dalam babak pertama pilpres.

Keberhasilan ini tidak memerlukan pilpres babak kedua (*majority-runoff*) kalau mencapai lebih dari 50% suara pemilih di separuh jumlah provinsi, dan paling sedikit mencapai 20% suara di tiap-tiap provinsi tersebut (Pasal 6A ayat (3) UUD 1945). Apa arti kemenangan ini? Pertama, keberhasilan SBYBoediono memenangi pilpres dalam satu babak telah mengukuhkan legitimasi kepresidenan 2009–2014.

Legitimasi ini lebih berkualitas daripada kemenangan SBY meraup 60% suara pada babak kedua Pilpres 2004 (waktu itu berpasangan dengan Jusuf Kalla). Lebih berkualitas karena dihasilkan langsung dari babak pertama dan bukan merupakan hasil akhir dari bekerjanya sistem *plurality-majority* pada pilpres dua babak (*two-round presidential election*). Kedua, pemilih langsung memilah pasangan caprescawapres dan menentukan pilihannya sehingga SBY-Boediono berhasil memenangi pilpres dalam satu babak.

Mungkin benar untuk mengatakan, ketokohan capres-cawapres begitu menentukan dalam pilpres langsung. Selain itu, pemilih Indonesia telah menunjukkan otonominya sehingga tak ingin bertele-tele dengan “membuang” Rp 4 triliun dalam pilpres babak kedua. Ketiga, SBY-Boediono memiliki keuntungan ganda dalam menyusun kabinetnya.

Dia sebagai *incumbent* dan memiliki waktu lebih banyak menyiapkan kabinet baru bersama mitra

koalisi (dari awal Juli hingga Oktober 2009). Kesempatan ini tidak dimiliki SBY di tahun 2004. Ketika itu dia bahkan menunda pengumuman kabinetnya. Kini legitimasi dan modal dasar kepresidenan SBY-Boediono justru diperoleh karena meningkatnya harapan-harapan massa pemilih.

Saya kira citra SBY-Boediono yang dibayangkan oleh massa pemilih bukan lagi sosok yang perlu mendapat simpati karena dizalimi atau dipojokkan oleh lawan-lawan politiknya. Keterpilihan SBY-Boediono dalam satu babak membuktikan keberhasilan pencitraan sebagai sosok yang memberikan uang bantuan langsung tunai (BLT), atau membagikan beras untuk keluarga miskin (raskin), jaminan kesehatan, dan bahkan anggaran pendidikan sebesar 20% APBN (meski sebetulnya merupakan mandat konstitusi).

*** Kemenangan SBY-Boediono dalam pilpres satu babak harus segera dibuktikan dengan kemampuan mengatur perilaku mitra koalisi dalam membentuk kabinet. Keleluasaan SBY karena berpasangan dengan Boediono sebagai wapres yang bebas dari kepentingan partai politik tidak membebaskannya dari tuntutan mitra koalisi.

Dinamika politik dalam tiga bulan ke depan akan membuktikannya. Pendukung resmi SBY-Boediono pada Pilpres 2009 jauh lebih banyak dari tahun 2004, baik dalam hal jumlah partai maupun dukungan suara. PKS, PPP, PAN, dan PKB akan menuntut bagian karena telah mengurangi lawan politik SBY dengan cara mendukung pencalonannya, meski Partai Demokrat memiliki suara terbesar (20%).

Sedikit banyak hal ini sekaligus menjadi faktor yang melemahkan tingginya legitimasi SBY dalam Pilpres 2009. Apa boleh buat. Pencitraan dirinya harus dinyatakan sesuai harapan pemilih yang telah memenangkannya dalam satu babak. Karena itu, SBY membutuhkan dukungan koalisi untuk mengamankan kebijakan pemerintahan.

Kohesi legislatif berupa koalisi 63% suara di parlemen yang mendukung SBY-Boediono akan menentukan efektivitas pemerintahan presidensial dalam memenuhi harapan pemilih. Berarti, dua persoalan dasar harus segera diselesaikan SBY dalam menyusun kabinetnya. Di satu sisi, dia harus menjaga kohesi legislatif dengan mengakomodasi mitra koalisi dalam kabinet.

Di sisi lain, SBY harus mampu menentukan pembantu-pembantu profesional yang menjanjikan kemampuan pemerintahan dalam mewujudkan pencitraan diri dan memenuhi harapan-harapan pemilih. Persoalan tersebut tak jauh berbeda dari tahun 2004. Dia sendiri waktu itu menjanjikan kabinetnya akan diisi oleh kalangan profesional (kabinet ahli) dengan kohesi dukungan politik. Namun, keinginan SBY terbukti tak terpenuhi.

Dia harus lebih banyak berkompromi, di antara faktornya yang menonjol adalah karena Partai Demokrat hanya meraup sekitar 7% suara (10% kursi parlemen), pendukungnya meluas dalam babak kedua Pilpres 2004 (Koalisi Kerakyatan) dan Wapres Jusuf Kalla cukup *powerful* dalam memainkan kartu politiknya.

Sekarang, meski Partai Demokrat memiliki basis suara atau kursi parlemen berlipat tiga dibanding tahun 2004m, pendukung resmi SBY juga meningkat. Pasti SBY akan memperhitungkan realitas politik ini. Sudah bagus kalau SBY berhasil menerapkan *fifty-fifty formula* dalam komposisi kabinet: separuh berisi kalangan profesional dan separuh dari partai koalisi.

Formula itu mungkin sudah dibayangkan SBY ketika dia kukuh memilih Boediono sebagai cawapresnya. Sebagai teknokrat profesional, Boediono diharapkan mampu mengatasi persoalan ekonomi di tengah krisis global (konon dampaknya akan lebih terasa pada awal pemerintahan SBY-Boediono).

Dream team di bidang ekonomi akan “ditentukan sendiri” oleh SBY-Boediono (termasuk investasi, infrastruktur, dan sumber daya), ditopang oleh kendali SBY terhadap portofolio di bidang politik dan keamanan (seperti Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pertahanan).

Namun, di sisi lain, merawat koalisi bukan merupakan perkara mudah. Selain faktor besar seperti kultur politik, para pimpinan partai koalisi sudah mengangankan tantangan lebih dinamik menuju Pilpres 2014, sedangkan SBY “sudah berakhir”. Kabinet yang solid bersama mitra koalisi dengan kohesi legislatif yang menjamin kebijakan pemerintahan merupakan jaminan kelembagaan yang penting bagi efektivitas pemerintahan SBY-Boediono.

Di sinilah tantangan SBY sepanjang tahun 2009–2014, yaitu menjalani dan mengakhiri kepresidenannya dengan lebih baik. Setelah dia memilih figur wapres Boediono yang disebutnya loyal dan dikampanyekan bersama sebagai “tidak memperkaya diri”, maka sorotan akan tertuju langsung pada faktor kepemimpinan SBY (*presidential leadership*). (Sumber: *Seputar Indonesia*, 11/7/2009)